

# **Jurnalis di Masa Pandemi Covid-19 : Antara Mencari Kebenaran dan Keselamatan**

**Fajar Junaedi**

Setelah paramedis, jurnalis berada di garda paling depan dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Melalui berita yang ditulis oleh jurnalis, masyarakat mendapatkan informasi terkini tentang pandemi Covid-19. Meskipun sudah ada media sosial, informasi yang berasal dari media arus utama (mainstream) masih mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Berhadapan dengan virus Covid-19 yang mematikan, mudah menular, dan belum dikenali dengan baik, jurnalis harus berhadapan dengan resiko keselamatan.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menerbitkan Protokol Keamanan Liputan dan Pemberitaan Covid-19 (2020) untuk melindungi jurnalis yang turun lapangan melakukan peliputan Covid-19. Ada 39 protokol bisa menjadi acuan panduan bagi jurnalis dan perusahaan media. Salah satu protokol menyebutkan bahwa jurnalis mempertimbangkan aspek keselamatan dalam bertugas tanpa harus mengabaikan fungsi utamanya meliput dan memberitakan peristiwa Covid-19 sebagai bentuk tanggungjawabnya kepada publik.

Apa yang dilakukan oleh AJI merupakan langkah maju bagi perlindungan jurnalis yang meliput pandemi Covid-19. Ini berbanding terbalik dengan kenyataan bahwa pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, terlihat gagap dalam mengelola komunikasi publik mengenai Covid-19.

Salah satu kasus yang menonjol adalah konferensi pers yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Gudang Angkasa Pura Kargo 530 (Cargo Area) Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang (27/3/2020). Konferensi pers yang dilakukan untuk menyampaikan informasi kepada publik tentang penyerahan bantuan dari China kepada pemerintah Indonesia terkait penanganan Covid-19.

Konferensi pers tersebut dilakukan secara langsung dengan mengundang dan melibatkan puluhan jurnalis dari berbagai media, tanpa diatur jarak aman antara jurnalis yang satu dengan yang lain. Ini tentu saja berpotensi penularan Covid-19 karena adanya kerumunan massa. Kebijakan komunikasi publik pemerintah ini satu langkah di belakang kebijakan yang didorong oleh AJI. Dalam protokol Protokol Keamanan Liputan dan Pemberitaan Covid-19, poin 16 (k) disebutkan bahwa Sedapat mungkin menjaga jarak dengan sesama jurnalis lain di lapangan dan narasumber minimal 1,5 meter.

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mengkritisi kebijakan konferensi pers yang melibatkan kerumunan massa. IJTI dalam pernyataannya menyesalkan penyelenggaraan konferensi pers Kemenkomarves yang tidak mengindahkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. Jika masih

ada konferensi pers tatap muka, dalam kondisi darurat virus corona, tidak dibenarkan *newsroom* menugaskan jurnalisnya.

Kenyataan lain yang harus dihadapi oleh jurnalis adalah merebaknya *hoax* tentang Covid-19. Media sosial menjadi tertuduh utama dalam penyebaran *hoax* yang merajalela. Tentu saja merebaknya *hoax* tentang Covid-19 tidak lepas dari masih minimnya pengetahuan kita tentang virus mematikan ini, yang kemudian dipolitisasi oleh pendengung (*buzzer*) di media sosial. Di sinilah esensi jurnalis untuk menyampaikan kebenaran mendapatkan signifikansinya.

Mengikuti apa yang dikemukakan oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstiel (2001), dalam bukunya *The Elements of Journalism, What Newspeople Should Know and the Public Should Expect*, bahwa kewajiban para jurnalis adalah menyampaikan kebenaran, sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang mereka perlukan untuk berdaulat.

Bentuk “kebenaran jurnalistik” yang ingin dicapai ini bukan sekadar akurasi, melainkan merupakan bentuk kebenaran yang praktis serta fungsional. Hal ini bukanlah kebenaran yang sifatnya mutlak atau filosofis. Kebenaran yang dimaksudkan di sini merupakan suatu proses menyortir (*sorting-out*) yang berkembang antara cerita awal, dan interaksi antara publik, sumber berita (*newsmaker*), dan jurnalis dalam waktu tertentu.

Untuk menggugurkan *hoax*, jurnalis harus turun ke lapangan. Lebih dari sekadar mengikuti konferensi pers pemerintah atau hanya mengutip rilis pers pemerintah. Jurnalis dituntut untuk turun berinteraksi dengan publik, termasuk korban dan penyintas Covid-19, beserta keluarga dan lingkungan sekitarnya. Ini tentu menuntut jurnalis untuk selalu berhati-hati agar tidak tertular Covid-19. Tentu saja, mematuhi protokol menjadi prasyarat mutlak yang harus dilakukan.

*Fajar Junaedi, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Makalah ini disajikan untuk diskusi bertema Regenerasi Nalar di Tengah Pandemi yang diadakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah se-cabang Kota Surakarta, 11 Mei 2020*